



MODUL LABORATORIUM **TATA KELOLA PEMERINTAHAN** **& DIGITAL GOVERNANCE**



SARJANA ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDENRENG
RAPPANG

KATA PENGANTAR REKTOR

Puji syukur ke hadirat Allah Swt., atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Modul Laboratorium Tata Kelola Pemerintahan & Digital Governance ini dapat disusun dan diterbitkan sebagai bagian integral dari penguatan mutu akademik Program Studi Sarjana Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang.

Modul ini disusun sebagai wujud komitmen universitas dalam mengembangkan ekosistem pembelajaran sarjana yang berbasis praktik (*practice-based learning*), riset terapan, dan pengabdian kepada masyarakat, sekaligus menjawab tantangan tata kelola pemerintahan dan transformasi digital sektor publik di era *Smart Village dan Digital Governance*. Kehadiran modul laboratorium ini menegaskan peran perguruan tinggi tidak hanya sebagai pusat pengembangan teori, tetapi juga sebagai laboratorium kebijakan dan tata kelola publik yang berdampak nyata bagi pembangunan daerah dan masyarakat.

Secara strategis, modul ini dirancang selaras dengan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS) Program Studi, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), serta profil lulusan Sarjana Ilmu Pemerintahan, dan disusun dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI). Integrasi nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) dalam modul ini menjadi ciri pembeda sekaligus penguat karakter lulusan yang profesional, beretika, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada tim penyusun, dosen, dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan modul ini. Besar harapan kami agar modul ini dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai pedoman operasional laboratorium, rujukan pembelajaran berbasis praktik, serta instrumen penjaminan mutu berkelanjutan dalam pengelolaan pendidikan sarjana ilmu pemerintahan.

Semoga modul ini memberikan manfaat yang luas bagi sivitas akademika, mitra pemerintah, dan masyarakat, serta menjadi bagian dari ikhtiar Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang dalam mewujudkan perguruan tinggi yang unggul, berkarakter, dan berdampak.

Sidenreng Rappang, Januari 2025
Rektor

Prof. Dr. H. Jamaluddin Ahmad, S.Sos., M.Si.

LEMBAR PENGESAHAN

MODUL LABORATORIUM TATA KELOLA PEMERINTAHAN & DIGITAL GOVERNANCE PROGRAM STUDI SARJANA ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDENRENG RAPPANG

Modul Laboratorium *Tata Kelola Pemerintahan & Digital Governance* ini disusun sebagai pedoman operasional pelaksanaan pembelajaran berbasis laboratorium, penelitian terapan, dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mendukung pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), dan profil lulusan, pada Program Studi Sarjana Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang.

Modul ini telah melalui proses penelaahan dan penetapan sesuai dengan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dan dinyatakan layak digunakan sebagai dokumen akademik resmi.

Disahkan di : Sidenreng Rappang
Pada Tanggal : 1 Januari 2025

Mengetahui,
Dekan FISIP



Dr. Erfina, S.Sos, M.Si
NIDN: 0919058503

Ketua Program Studi



Sandi Lubis, S.IP, M.A.P.
NIDN: 0930069203

Mengetahui,
Rektor



Prof. Dr. H. Jamaluddin Ahmad, S.Sos., M.Si.
NIDN: 0907057001

HALAMAN HAK CIPTA

© 2025

**Program Studi Sarjana Ilmu Pemerintahan
Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang**

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku modul ini dalam bentuk apa pun dan dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit, kecuali untuk kepentingan pendidikan dan penelitian dengan mencantumkan sumber secara layak.

Modul ini digunakan secara terbatas untuk kepentingan akademik di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang dan mitra kerja sama yang sah.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Kami menyatakan bahwa Modul Laboratorium Tata Kelola Pemerintahan & Digital Governance ini merupakan karya asli yang disusun secara mandiri oleh tim penyusun berdasarkan kebutuhan pengembangan akademik Program Studi Sarjana Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang.

Seluruh sumber rujukan yang digunakan telah dicantumkan sesuai dengan kaidah akademik. Apabila di kemudian hari ditemukan unsur plagiarisme atau pelanggaran etika akademik, maka tanggung jawab sepenuhnya berada pada tim penyusun.

Sidenreng Rappang, 2025

Tim Penyusun Modul

METADATA BUKU MODUL

- **Judul Buku**
Modul Laboratorium Tata Kelola Pemerintahan & Digital Governance
- **Bidang Ilmu**
Ilmu Pemerintahan / Tata Kelola Pemerintahan / Digital Governance
- **Program Studi**
Sarjana Ilmu Pemerintahan
- **Fakultas**
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- **Perguruan Tinggi**
Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang
- **Keunikan Keilmuan**
Tata Kelola Pemerintahan berbasis Smart Village, Digital Governance, Kewirausahaan Digital, dan Nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK)
- **Jenis Buku**
Modul Laboratorium (Buku Ajar Institusional)
- **Tahun Terbit**
2025
- **Tahun Berlaku**
2026–2030 (dapat ditinjau melalui mekanisme PPEPP)
- **ISBN Internal**
ISBN Internal UMS Rappang: 978-623-UMSR-IP-DG-2026
(kode internal institusional; bukan ISBN nasional)
- **Penanggung Jawab**
Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Pemerintahan
- **Penetapan**
Ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

A. IDENTITAS MODUL

1. Nama Laboratorium

Laboratorium Tata Kelola Pemerintahan & Digital Governance

Laboratorium ini merupakan unit akademik pendukung pembelajaran, penelitian terapan, dan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada pengembangan dan penguatan praktik tata kelola pemerintahan serta transformasi digital sektor publik.

2. Program Studi

Program Studi Sarjana Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

3. Keunikan Keilmuan

Laboratorium ini memiliki keunikan keilmuan pada pengembangan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis Smart Village dan Digital Governance, dengan penguatan kewirausahaan digital serta nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK). Keunikan ini diwujudkan melalui:

- Pendekatan tata kelola pemerintahan yang adaptif terhadap transformasi digital,
- Integrasi sistem pemerintahan desa dan daerah berbasis Smart Village,
- Penanaman nilai AIK dalam praktik kepemimpinan publik, etika birokrasi, dan pelayanan publik,
- Orientasi pada peningkatan kualitas layanan publik dan pembangunan daerah berkelanjutan.

Keunikan tersebut memperkuat diferensiasi Program Studi Sarjana Ilmu Pemerintahan UMS Rappang melalui integrasi Smart Village, Digital Governance, kewirausahaan digital, dan tata kelola pemerintahan berdaya saing global.

4. Bentuk Laboratorium

Hybrid Laboratory, dengan karakteristik:

- Non-fisik (virtual & konseptual): Berbasis sistem tata kelola pemerintahan, kebijakan publik, dan digitalisasi layanan publik.
- Didukung perangkat simulasi dan analisis digital, seperti:
 - simulasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik,
 - analisis kinerja kelembagaan publik,
 - pemodelan digital governance dan Smart Village,
 - studi kasus berbasis data dan evidence.

Bentuk hybrid ini dirancang untuk menjamin efisiensi, fleksibilitas, keberlanjutan, dan relevansi praktik akademik dengan kebutuhan dunia kerja dan pemangku kepentingan.

5. Dasar Penyusunan Modul

Modul Laboratorium Tata Kelola Pemerintahan & Digital Governance disusun berdasarkan landasan kebijakan dan akademik sebagai berikut:

a. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS)

Program Studi Sarjana Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang, dengan arah keilmuan Smart Village, kewirausahaan digital, dan tata kelola pemerintahan berdaya saing global, serta penguatan Digital Governance dalam pembelajaran, penelitian, dan inovasi.

b. Peta Jalan Laboratorium Program Studi

Sebagai arah strategis pengembangan, pengelolaan, dan keberlanjutan laboratorium dalam mendukung tridarma perguruan tinggi.

c. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) CPL1–CPL10

Sebagai dasar penjaminan keterkaitan laboratorium dengan:

- penguasaan pengetahuan,
- keterampilan profesional,
- sikap dan nilai lulusan.

d. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI)

Sebagai acuan pemenuhan standar pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

e. Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) LAMSPAK 2.0

Terutama **Syarat Perlu Unggul**, yang menekankan:

- kejelasan keunikan program studi,
- keterkaitan VMTS–CPL–kurikulum–laboratorium,
- bukti implementasi, evaluasi, dan keberlanjutan.

B. LANDASAN DAN URGENSI MODUL

1. Peran Laboratorium Tata Kelola Pemerintahan & Digital Governance

Laboratorium Tata Kelola Pemerintahan & Digital Governance berperan strategis sebagai wahana integratif dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi, khususnya dalam mendukung pencapaian capaian pembelajaran lulusan Program Studi Sarjana Ilmu Pemerintahan. Dalam konteks pembelajaran, laboratorium ini berfungsi sebagai ruang praktik dan simulasi tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik berbasis kasus nyata, sehingga mahasiswa tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu menerapkannya secara kontekstual. Dalam aspek penelitian, laboratorium menjadi pusat riset terapan yang mendorong pengembangan model tata kelola pemerintahan, digital governance, dan Smart Village yang relevan dengan kebutuhan pemerintah daerah dan desa. Sementara itu, dalam pengabdian kepada masyarakat, laboratorium berperan sebagai instrumen penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan desa melalui pendampingan tata kelola, digitalisasi layanan publik, serta penyusunan rekomendasi kebijakan yang berbasis data dan bukti.

2. Tantangan Tata Kelola Pemerintahan di Era Kontemporer

Pengembangan modul Laboratorium Tata Kelola Pemerintahan & *Digital Governance* dilandasi oleh berbagai tantangan tata kelola pemerintahan yang semakin kompleks. Pada era desentralisasi dan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut memiliki kapasitas manajerial, kelembagaan, dan kebijakan yang adaptif terhadap dinamika lokal. Tantangan reformasi birokrasi dan penerapan prinsip good governance menuntut peningkatan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan kualitas pelayanan publik. Di sisi lain, transformasi digital layanan publik mendorong perubahan paradigma tata kelola pemerintahan menuju pemanfaatan teknologi informasi dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelayanan kepada masyarakat. Tantangan tersebut semakin menguat dengan kebutuhan implementasi *Smart Village* dan *e-Government*, khususnya dalam mengintegrasikan sistem pemerintahan desa dan daerah secara berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

3. Kebutuhan Laboratorium sebagai Wahana Strategis

Merespons berbagai tantangan tersebut, diperlukan Laboratorium Tata Kelola Pemerintahan & Digital Governance sebagai wahana strategis yang mampu menjembatani teori dan praktik. Laboratorium ini menjadi ruang simulasi tata kelola pemerintahan, tempat mahasiswa dan dosen mengkaji serta mempraktikkan proses pengambilan keputusan publik, pengelolaan organisasi sektor publik, dan reformasi birokrasi. Selain itu, laboratorium berfungsi sebagai sarana praktik digitalisasi layanan publik, termasuk perancangan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi dan model digital governance. Lebih jauh, laboratorium berperan dalam penguatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik, melalui praktik tata kelola yang partisipatif, berbasis data, serta berlandaskan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK). Dengan demikian, keberadaan laboratorium ini menjadi kebutuhan esensial untuk memastikan lulusan memiliki kompetensi profesional, etis, dan adaptif terhadap tuntutan tata kelola pemerintahan modern.

C. TUJUAN MODUL

1. Tujuan Umum

Modul Laboratorium Tata Kelola Pemerintahan & Digital Governance disusun untuk menyediakan panduan operasional dalam pengelolaan dan pemanfaatan laboratorium sebagai wahana pembelajaran berbasis praktik, riset terapan, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang tata kelola pemerintahan dan digitalisasi sektor publik. Modul ini diarahkan untuk mendukung pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) serta penguatan profil lulusan Sarjana Ilmu Pemerintahan sebagai Aparatur Negara, Konsultan Pemerintahan, Pegiat LSM/Aktivis Sosial Politik Pemerintahan, dan Government Relation Officer yang adaptif terhadap dinamika Smart Village, Digital Governance, kewirausahaan digital, dan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK).

2. Tujuan Khusus

Melalui pelaksanaan kegiatan Laboratorium Tata Kelola Pemerintahan & Digital Governance, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menganalisis tata kelola pemerintahan dan kinerja sektor publik secara komprehensif dan berbasis data, dengan memperhatikan aspek kelembagaan, proses, aktor, serta hasil kebijakan publik pada tingkat daerah dan desa.
2. Merancang inovasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis digital, termasuk pengembangan model digital governance, sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi, serta praktik inovasi pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
3. Mengimplementasikan prinsip good governance dan digital governance dalam praktik pengelolaan organisasi sektor publik, melalui penerapan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, partisipasi publik, dan integritas dalam pengambilan keputusan.
4. Mengintegrasikan konsep Smart Village dalam tata kelola pemerintahan daerah dan desa, khususnya dalam perencanaan pembangunan, pengelolaan layanan publik, dan penguatan kapasitas kelembagaan desa yang berorientasi pada keberlanjutan dan pemberdayaan masyarakat.

D. KETERKAITAN DENGAN CPL DAN PROFIL LULUSAN

1. Keterkaitan dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Laboratorium Tata Kelola Pemerintahan & Digital Governance memiliki keterkaitan yang kuat dan langsung dengan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Sarjana Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang, terutama pada CPL berikut:

- CPL1 (Penguasaan konsep, teori, dan prinsip Ilmu Pemerintahan). Laboratorium memperkuat pemahaman konseptual dan aplikatif mahasiswa tentang organisasi pemerintahan, tata kelola, pelayanan publik, serta pengelolaan proses pemerintahan melalui simulasi dan analisis kasus nyata.
- CPL2 (Analisis masalah pemerintahan dan kebijakan publik). Kegiatan laboratorium melatih mahasiswa mengidentifikasi, menganalisis, dan memetakan masalah pemerintahan, kebijakan publik, dan dinamika sosial-politik secara multidisipliner serta berbasis data dan bukti.
- CPL3 (Tata kelola pemerintahan daerah dan desa). Laboratorium menjadi wahana praktik analisis kelembagaan, hubungan kewenangan, tata kelola pemerintahan daerah dan desa, serta penyusunan alternatif perbaikan tata kelola yang akuntabel dan responsif.
- CPL4 (Digital Governance dan pelayanan publik digital). Laboratorium memperkuat kompetensi mahasiswa dalam tata kelola digital, keterbukaan informasi, kualitas data, keamanan dan privasi, serta perancangan perbaikan layanan publik berbasis teknologi.
- CPL5 (Smart Village, pembangunan lokal, dan inovasi pelayanan berbasis komunitas). Melalui pendekatan Smart Village, laboratorium mendukung kemampuan mahasiswa merancang program pemberdayaan desa/daerah, co-creation, dan inovasi layanan berbasis data dan teknologi.
- CPL8 (Good governance, jejaring kebijakan, dan tata kelola kolaboratif). Kegiatan laboratorium mengembangkan kemampuan koordinasi, negosiasi, dan kemitraan pemerintah-masyarakat-dunia usaha dalam penyelesaian masalah publik secara etis dan partisipatif.

2. Keterkaitan dengan Profil Lulusan

Pelaksanaan Modul Laboratorium Tata Kelola Pemerintahan & Digital Governance secara langsung mendukung profil lulusan Program Studi Sarjana Ilmu Pemerintahan, yaitu:

- **✓ Aparatur Negara**
Mahasiswa dibekali pemahaman kelembagaan, tata kelola, pelayanan publik, etika, dan kemampuan menggunakan teknologi untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan akuntabel.
- **✓ Konsultan Pemerintahan**
Laboratorium memperkuat kemampuan analisis masalah pemerintahan, kebijakan publik, riset, penyusunan rekomendasi, dan desain perbaikan tata kelola berbasis data dan bukti.

- **✓ Pegiat LSM/Aktivis Sosial Politik Pemerintahan**
Kegiatan laboratorium mengembangkan kemampuan pemberdayaan masyarakat, advokasi, partisipasi warga, Smart Village, serta kolaborasi multiaktor dalam penyelesaian masalah publik.
- **✓ Government Relation Officer**
Laboratorium menguatkan kemampuan komunikasi pemerintahan, jejaring kelembagaan, negosiasi, advokasi kebijakan, dan pengelolaan hubungan pemangku kepentingan secara etis.

Tabel 1. Matriks Keterkaitan CPL – Profil Lulusan

Kode CPL	Uraian CPL (Ringkas)	Aparatur Negara	Konsultan Pemerintahan	Pegiat LSM/Aktivis Sosial Politik	Government Relation Officer
CPL1	Konsep, teori, dan prinsip Ilmu Pemerintahan	✓✓	✓	✓	✓
CPL2	Analisis masalah pemerintahan, kebijakan publik, dan dinamika sosial-politik	✓	✓✓	✓	✓
CPL3	Tata kelola pemerintahan daerah dan desa	✓✓	✓✓	✓	✓
CPL4	Digital Governance, data, keterbukaan informasi, dan pelayanan publik digital	✓	✓✓	✓	✓✓
CPL5	Smart Village, pembangunan lokal, partisipasi, dan inovasi pelayanan	✓	✓	✓✓	✓
CPL6	Kewirausahaan digital, inovasi sosial, dan model berdampak	✓	✓	✓✓	✓
CPL7	Metodologi penelitian dan etika riset Ilmu Pemerintahan	✓	✓✓	✓	✓
CPL8	Good governance, jejaring kebijakan, dan tata kelola kolaboratif	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
CPL9	Regulasi, komunikasi publik, dan advokasi kebijakan	✓	✓✓	✓✓	✓✓
CPL10	AIK, etika profesi, dan kepemimpinan publik	✓✓	✓	✓✓	✓✓

Keterangan:

- **✓✓** = Kontribusi utama/dominan
- **✓** = Kontribusi pendukung
- **–** = Tidak menjadi fokus utama

Matriks keterkaitan CPL-Profil Lulusan menunjukkan bahwa capaian pembelajaran Program Studi Sarjana Ilmu Pemerintahan dipetakan secara sistematis terhadap profil lulusan. Pemetaan ini memastikan bahwa setiap profil lulusan didukung oleh kombinasi CPL yang relevan, terukur, dan berorientasi pada praktik Ilmu Pemerintahan berbasis Smart Village, Digital Governance, kewirausahaan digital, dan nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah.

Matriks Keterkaitan CPL - Profil Lulusan Program Studi Sarjana Ilmu Pemerintahan					
CPL	Uraian CPL (ringkas)	Aparatur Negara	Konsultan Pemerintahan	Pegiat LSM/ Aktivis	Government Relation Officer
CPL1	Konsep, teori, dan prinsip Ilmu Pemerintahan	✓✓	✓	✓	✓
CPL2	Analisis masalah pemerintahan, kebijakan publik, dan dinamika sosial-politik	✓	✓✓	✓	✓
CPL3	Tata kelola pemerintahan daerah dan desa	✓✓	✓✓	✓	✓
CPL4	Digital Governance, data, keterbukaan informasi, dan pelayanan publik digital	✓	✓✓	✓	✓✓
CPL5	Smart Village, pembangunan lokal, partisipasi, dan inovasi pelayanan	✓	✓	✓✓	✓
CPL6	Kewirausahaan digital, inovasi sosial, dan model berdampak	✓	✓	✓✓	✓
CPL7	Metodologi penelitian dan etika riset Ilmu Pemerintahan	✓	✓✓	✓	✓
CPL8	Good governance, jejaring kebijakan, dan tata kelola kolaboratif	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
CPL9	Regulasi, komunikasi publik, dan advokasi kebijakan	✓	✓✓	✓✓	✓✓
CPL10	AIK, etika profesi, dan kepemimpinan publik	✓✓	✓	✓✓	✓✓

✓✓ = kontribusi utama/dominan ✓ = kontribusi pendukung

Pemetaan ini menunjukkan keterhubungan CPL Program Studi Sarjana Ilmu Pemerintahan dengan empat profil lulusan utama dan menjadi acuan integrasi pembelajaran serta kegiatan laboratorium.

Gambar 1. Matriks Keterkaitan CPL – Profil Lulusan

E. RUANG LINGKUP DAN MATERI MODUL

Ruang lingkup Modul Laboratorium Tata Kelola Pemerintahan & Digital Governance mencakup penguasaan konseptual, pengembangan keterampilan analitis, serta praktik aplikatif tata kelola pemerintahan dan transformasi digital sektor publik yang relevan dengan kebutuhan pemerintahan pusat, daerah, dan desa berbasis Smart Village. Materi modul dirancang untuk mendukung pembelajaran berbasis praktik (practice-based learning), riset terapan, dan pengabdian masyarakat berbasis penguatan tata kelola dan pelayanan publik.

Materi modul meliputi:

1. **Konsep Good Governance dan New Public Governance**
Prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, responsif, dan kolaboratif dalam konteks Ilmu Pemerintahan modern.
2. **Tata Kelola Pemerintahan Pusat dan Daerah**
Kerangka kelembagaan, relasi antarlevel pemerintahan, serta praktik tata kelola pemerintahan dalam sistem desentralisasi dan otonomi daerah.
3. **Reformasi Birokrasi dan Manajemen Kinerja Publik**
Strategi reformasi birokrasi, pengukuran kinerja organisasi publik, dan peningkatan kualitas layanan publik berbasis hasil (outcome-based governance).
4. **Digital Governance dan e-Government**
Konsep, kebijakan, dan implementasi digital governance, termasuk pemanfaatan teknologi informasi dalam pengambilan keputusan dan pelayanan publik.
5. **Smart Village dan Digitalisasi Pemerintahan Desa**
Model tata kelola desa berbasis Smart Village, integrasi teknologi digital, serta penguatan kapasitas pemerintahan desa dan masyarakat.
6. **Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi**
Perancangan dan evaluasi inovasi pelayanan publik digital, termasuk layanan berbasis aplikasi, sistem informasi, dan platform partisipatif.
7. **Sistem Informasi Pemerintahan dan Open Government**
Pengelolaan data dan informasi pemerintahan, keterbukaan data publik, serta pemanfaatan open government untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
8. **Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Publik Digital**
Mekanisme penguatan pengawasan publik, partisipasi warga, dan akuntabilitas pemerintahan melalui kanal digital.
9. **Evaluasi Kinerja Tata Kelola dan Layanan Publik**
Teknik evaluasi kinerja tata kelola dan pelayanan publik berbasis indikator, data, dan bukti (evidence-based evaluation).
10. **Etika Pemerintahan dan Nilai AIK dalam Digital Governance**
Integrasi nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) dalam praktik tata kelola pemerintahan dan transformasi digital sektor publik yang beretika dan berkeadilan.

[illegible]

6	Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi	○	✓	○	✓	○	✓	✓	✓	○	✓
7	Sistem Informasi Pemerintahan dan Open Government	○	✓	○	✓	○	○	✓	✓	○	✓
8	Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Publik Digital	✓	✓	○	✓	○	✓	✓	✓	✓	✓
9	Evaluasi Kinerja Tata Kelola dan Layanan Publik	○	✓	✓	○	○	✓	✓	✓	○	✓
10	Etika Pemerintahan dan Nilai AIK dalam Digital Governance	✓	○	○	✓	✓	✓	✓	○	✓	✓

F. BENTUK KEGIATAN LABORATORIUM

Kegiatan Laboratorium Tata Kelola Pemerintahan & Digital Governance dirancang sebagai wahana pembelajaran aplikatif, riset terapan, dan pengabdian kepada masyarakat yang terintegrasi dengan kurikulum Sarjana Ilmu Pemerintahan. Bentuk kegiatan laboratorium meliputi:

1. Simulasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Mahasiswa melaksanakan simulasi proses tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, mulai dari perencanaan, pengambilan keputusan, koordinasi antarlembaga, hingga evaluasi kinerja. Kegiatan ini menggunakan studi kasus nyata pemerintahan daerah dan desa untuk melatih kemampuan analisis tata kelola, kepemimpinan publik, serta pengambilan keputusan berbasis prinsip *good governance* dan nilai AIK.

2. Praktik Digitalisasi Layanan Publik

Laboratorium memfasilitasi praktik perancangan dan analisis digitalisasi layanan publik, termasuk simulasi e-government, aplikasi layanan berbasis digital, serta pemanfaatan sistem informasi pemerintahan. Kegiatan ini mendukung penguasaan konsep dan praktik digital governance serta transformasi layanan publik yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

3. Analisis Kinerja OPD dan Pemerintahan Desa

Mahasiswa melakukan analisis kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemerintahan desa dengan menggunakan indikator kinerja, prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik. Analisis dilakukan berbasis data dan dokumen kebijakan untuk memperkuat kemampuan evaluasi tata kelola dan pelayanan publik, khususnya dalam konteks pembangunan daerah dan *Smart Village*.

4. Klinik Inovasi Tata Kelola dan Layanan Publik

Laboratorium menyelenggarakan klinik inovasi sebagai forum pengembangan gagasan, desain, dan model inovasi tata kelola serta pelayanan publik. Mahasiswa didampingi dosen dan praktisi untuk merancang solusi inovatif berbasis digital, *Smart Village*, dan nilai AIK yang responsif terhadap permasalahan nyata di sektor publik.

5. Kolaborasi dengan Mitra Strategis

Kegiatan laboratorium dilaksanakan melalui kolaborasi berkelanjutan dengan:

- **Pemerintah Daerah**, sebagai mitra praktik tata kelola dan kebijakan publik;
- **Desa/Kelurahan Smart Village**, sebagai laboratorium lapangan penerapan tata kelola desa dan digitalisasi pemerintahan;
- **OPD dan unit layanan publik**, sebagai mitra analisis kinerja, inovasi layanan, dan penguatan kapasitas kelembagaan.

Kolaborasi ini mendukung ketercapaian CPL, penguatan profil lulusan, serta memastikan relevansi dan keberlanjutan kegiatan laboratorium dalam konteks kebutuhan nyata sektor publik.

G. INTEGRASI DENGAN MATA KULIAH

Laboratorium Tata Kelola Pemerintahan & Digital Governance diintegrasikan secara langsung dan terstruktur ke dalam proses pembelajaran pada mata kuliah inti dan keahlian Program Studi Sarjana Ilmu Pemerintahan. Integrasi ini dirancang untuk memperkuat ketercapaian CPL, mendukung profil lulusan, serta memastikan pembelajaran berbasis praktik, riset terapan, dan pemecahan masalah nyata pemerintahan. Integrasi tersebut diwujudkan melalui kegiatan laboratorium sebagai bagian dari tugas terstruktur, studi kasus, proyek kelompok, dan praktik lapangan pada mata kuliah berikut:

1. Manajemen Pemerintahan (IP007)

Laboratorium mendukung mata kuliah ini melalui simulasi pengelolaan organisasi pemerintahan, analisis struktur dan proses manajemen OPD, serta evaluasi kinerja organisasi publik. Kegiatan memperkuat kemampuan mahasiswa mengelola organisasi dan layanan pemerintahan secara efektif, akuntabel, dan berorientasi hasil.

2. Pemerintahan Digital (IP013)

Integrasi dilakukan melalui praktik dan simulasi transformasi digital pemerintahan, analisis kesiapan digital organisasi publik, serta perancangan inovasi berbasis teknologi informasi. Laboratorium menjadi wahana aplikatif untuk memahami perubahan proses kerja, data, dan layanan akibat digitalisasi.

3. Digital Governance dan Pelayanan Publik (IP015)

Laboratorium digunakan sebagai ruang praktik digital governance melalui simulasi layanan digital, analisis interoperabilitas dan tata kelola data, serta evaluasi kualitas layanan berbasis teknologi. Mahasiswa dilatih merancang perbaikan layanan yang aman, inklusif, dan berbasis bukti.

4. Smart Village dan Tata Kelola Desa (IP014)

Integrasi laboratorium difokuskan pada praktik tata kelola desa berbasis Smart Village, pemetaan potensi dan masalah desa berbasis data, digitalisasi pemerintahan desa, dan penguatan partisipasi masyarakat serta kemitraan multipihak.

5. Tata Kelola Pemerintahan (IP008)

Laboratorium berperan sebagai ruang analisis dan klinik perbaikan tata kelola untuk mengkaji prinsip good governance, akuntabilitas, jejaring kebijakan, tata kelola kolaboratif, dan inovasi kelembagaan berdasarkan kasus pemerintahan daerah/desa.

6. Metodologi Ilmu Pemerintahan (IP019)

Laboratorium dimanfaatkan sebagai sarana penerapan metodologi penelitian Ilmu Pemerintahan, khususnya penelitian terapan di bidang tata kelola dan digital governance. Mahasiswa melakukan pengumpulan dan analisis data serta penyusunan laporan ilmiah/kebijakan sebagai bekal penelitian dan skripsi.

Integrasi Laboratorium Tata Kelola Pemerintahan & Digital Governance dengan mata kuliah tersebut memastikan keterpaduan teori, praktik, dan riset terapan serta memperkuat kompetensi profil lulusan sebagai Aparatur Negara, Konsultan Pemerintahan, Pegiat LSM/Aktivis Sosial Politik Pemerintahan, dan Government Relation Officer.

Tabel 3. Matriks Integrasi Mata Kuliah – Kegiatan Laboratorium – CPL – Luaran

(Laboratorium Tata Kelola Pemerintahan & Digital Governance)

No	Mata Kuliah	Kegiatan Laboratorium	CPL yang Didukung	Luaran Utama	Bukti Fisik
1	Manajemen Pemerintahan (IP007)	Simulasi pengelolaan organisasi pemerintahan dan analisis kinerja OPD	CPL1, CPL3, CPL8	Laporan analisis manajemen/tata kelola pemerintahan	Modul praktikum, laporan mahasiswa, rubrik penilaian, dokumentasi kegiatan
2	Pemerintahan Digital (IP013)	Analisis kesiapan digital dan desain inovasi proses pemerintahan	CPL2, CPL4	Proposal/desain inovasi pemerintahan digital	RPS terintegrasi, proposal proyek, logbook kegiatan
3	Digital Governance dan Pelayanan Publik (IP015)	Simulasi layanan digital, tata kelola data, dan evaluasi kualitas layanan	CPL2, CPL4, CPL8	Prototipe/laporan evaluasi layanan publik digital	Studi kasus, prototipe, laporan evaluasi, instrumen penilaian
4	Smart Village dan Tata Kelola Desa (IP014)	Pemetaan desa berbasis data dan perancangan roadmap/prototipe Smart Village	CPL3, CPL5, CPL8	Roadmap/model tata kelola desa Smart Village	Dokumen model, laporan kegiatan, dokumentasi mitra desa

5	Tata Kelola Pemerintahan (IP008)	Analisis good governance, akuntabilitas, jejaring, dan tata kelola kolaboratif	CPL1, CPL3, CPL8	Desain perbaikan tata kelola pemerintahan	Laporan analisis, policy brief, rubrik, berita acara klinik
6	Metodologi Ilmu Pemerintahan (IP019)	Pengumpulan dan analisis data tata kelola & digital governance	CPL2, CPL7	Laporan penelitian Ilmu Pemerintahan	Instrumen penelitian, dataset, laporan penelitian
7	Kebijakan Sektor Publik (IP009)	Analisis dan simulasi kebijakan sektor publik berbasis kasus pemerintahan	CPL2, CPL9	Draft rekomendasi/policy brief	Draft kebijakan, notulen simulasi, rubrik asesmen
8	Pelayanan Publik (IP011)	Evaluasi kualitas layanan dan perancangan prototipe inovasi pelayanan	CPL1, CPL4, CPL8	Prototipe/rekomendasi inovasi pelayanan publik	Laporan analisis, prototipe, lembar validasi, umpan balik dosen
9	Perencanaan Pembangunan (IP010)	Analisis perencanaan pembangunan daerah/desa berbasis data dan partisipasi	CPL3, CPL5, CPL8	Rekomendasi/rancangan program pembangunan	Laporan analisis, dokumen perencanaan, presentasi
10	Skripsi	Riset Ilmu Pemerintahan berbasis masalah nyata tata kelola dan digital governance	CPL2, CPL7, CPL9	Skripsi dan/atau artikel ilmiah	Proposal skripsi, laporan kemajuan, naskah skripsi/artikel

H. LUARAN MODUL

Luaran Modul Laboratorium Tata Kelola Pemerintahan & Digital Governance dirancang untuk menghasilkan capaian yang nyata, terukur, dan berdampak, baik pada peningkatan kompetensi mahasiswa maupun pada penguatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat daerah dan desa. Luaran yang dihasilkan meliputi:

1. Model Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik
Model konseptual dan operasional tata kelola pemerintahan yang mengintegrasikan prinsip *good governance*, *digital governance*, dan pendekatan *Smart Village*, yang dapat diaplikasikan pada konteks pemerintahan daerah, OPD, dan pemerintahan desa.
2. Prototipe Inovasi Layanan Publik Digital
Prototipe atau rancangan awal (*mock-up*) inovasi layanan publik berbasis teknologi informasi, seperti alur digitalisasi layanan, dashboard kinerja layanan, atau sistem layanan publik sederhana yang mendukung efektivitas, efisiensi, dan transparansi.
3. Rekomendasi Perbaikan Tata Kelola dan Pelayanan Publik
Dokumen rekomendasi kebijakan dan tata kelola yang disusun berdasarkan hasil analisis kinerja, evaluasi layanan, dan simulasi tata kelola pemerintahan, yang relevan untuk dijadikan masukan bagi pemerintah daerah, OPD, dan desa/kelurahan mitra.
4. Publikasi Ilmiah Terapan
Artikel ilmiah terapan hasil kegiatan laboratorium yang dipublikasikan atau disiapkan untuk publikasi pada jurnal nasional atau prosiding ilmiah sebagai bentuk integrasi laboratorium dengan penelitian dan penguatan budaya akademik mahasiswa sarjana.
5. Modul, SOP, dan Dokumen Inovasi Tata Kelola
Dokumen pendukung berupa modul praktikum, standar operasional prosedur (SOP), serta dokumen inovasi tata kelola dan layanan publik yang dapat digunakan secara berkelanjutan dalam kegiatan pembelajaran, riset terapan, dan pengabdian kepada masyarakat.

I. PENILAIAN DAN EVALUASI

1. Penilaian Kinerja Mahasiswa

Penilaian kinerja mahasiswa dalam Laboratorium Tata Kelola Pemerintahan & Digital Governance dilaksanakan secara autentik, berkelanjutan, dan berbasis capaian pembelajaran lulusan (CPL), dengan menekankan kemampuan analisis, inovasi, dan penerapan konsep dalam konteks nyata tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Bentuk penilaian meliputi:

- Analisis Tata Kelola dan Layanan Publik
Penilaian terhadap kemampuan mahasiswa dalam menganalisis tata kelola pemerintahan, kinerja OPD, dan kualitas pelayanan publik menggunakan kerangka *good governance*, *digital governance*, dan pendekatan Smart Village, yang dituangkan dalam laporan analisis berbasis data dan bukti.
- Proyek Inovasi Digital Governance
Penilaian terhadap proyek kelompok atau individu berupa perancangan inovasi tata kelola atau layanan publik berbasis digital, termasuk rancangan sistem, prototipe layanan, atau model inovasi yang relevan dengan kebutuhan pemerintah daerah dan desa.
- Presentasi Hasil Simulasi dan Rekomendasi
Penilaian kemampuan mahasiswa dalam mempresentasikan hasil simulasi tata kelola pemerintahan, inovasi layanan publik, serta rekomendasi perbaikan tata kelola secara argumentatif, komunikatif, dan profesional, baik kepada dosen maupun mitra pemangku kepentingan.

Penilaian dilakukan menggunakan rubrik yang terstandar, transparan, dan terdokumentasi, serta menjadi bagian dari bukti sah pencapaian CPL.

2. Evaluasi Laboratorium

Evaluasi Laboratorium Tata Kelola Pemerintahan & Digital Governance dilaksanakan secara periodik sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu internal untuk memastikan efektivitas, relevansi, dan keberlanjutan pengelolaan laboratorium. Evaluasi mencakup:

- Ketercapaian CPL
Evaluasi terhadap kontribusi kegiatan laboratorium dalam mendukung ketercapaian CPL, khususnya CPL terkait tata kelola pemerintahan, digital governance, Smart Village, dan pembangunan daerah berkelanjutan, yang dianalisis melalui hasil penilaian mahasiswa dan luaran kegiatan.
- Relevansi Luaran dengan Kebutuhan Pengguna
Evaluasi kesesuaian luaran laboratorium (model tata kelola, prototipe inovasi, rekomendasi, dan dokumen pendukung) dengan kebutuhan pemerintah daerah, OPD, dan desa/kelurahan mitra, sebagai bentuk *link and match* antara akademik dan praktik.
- Kepuasan Mitra dan Pemangku Kepentingan
Evaluasi tingkat kepuasan mitra dan pemangku kepentingan melalui umpan balik terstruktur, survei, atau forum evaluasi bersama, yang menjadi dasar perbaikan dan pengembangan berkelanjutan laboratorium.

Hasil evaluasi laboratorium digunakan sebagai input dalam siklus PPEPP, sehingga pengelolaan Laboratorium Tata Kelola Pemerintahan & Digital Governance berlangsung secara sistematis, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan.

J. PPEPP PENGELOLAAN LABORATORIUM

Pengelolaan Laboratorium Tata Kelola Pemerintahan & Digital Governance dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan melalui mekanisme PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) sebagai bagian integral dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Program Studi Sarjana Ilmu Pemerintahan.

1. Penetapan (P)

Tahap penetapan dilakukan melalui penyusunan dan pengesahan berbagai dokumen dan perangkat pendukung pengelolaan laboratorium, meliputi:

- Modul Laboratorium Tata Kelola Pemerintahan & Digital Governance sebagai pedoman operasional pembelajaran, riset terapan, dan PkM;
- Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan laboratorium;
- Penetapan mitra strategis, seperti pemerintah daerah, OPD, dan desa/kelurahan Smart Village;
- Sistem pendukung digital, termasuk platform simulasi tata kelola, dokumentasi kegiatan, dan pelaporan luaran laboratorium.

2. Pelaksanaan (P)

Tahap pelaksanaan mencakup implementasi seluruh kegiatan laboratorium sesuai modul dan SOP yang telah ditetapkan, meliputi:

- Praktik pembelajaran berbasis laboratorium, seperti simulasi tata kelola pemerintahan dan digitalisasi layanan publik;
- Riset terapan di bidang tata kelola pemerintahan dan digital governance;
- Pengabdian kepada masyarakat (PkM) berbasis penguatan kapasitas tata kelola dan pelayanan publik bagi mitra pemerintah dan desa.

3. Evaluasi (E)

Evaluasi dilakukan secara berkala untuk menilai efektivitas pengelolaan dan kontribusi laboratorium, dengan fokus pada:

- Ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang didukung oleh kegiatan laboratorium;
- Kualitas dan relevansi luaran, seperti model tata kelola, prototipe layanan digital, rekomendasi kebijakan, dan publikasi terapan;
- Umpan balik mahasiswa dan mitra sebagai pengguna utama luaran laboratorium.

4. Pengendalian (P)

Tahap pengendalian dilaksanakan melalui:

- Analisis hasil evaluasi untuk mengidentifikasi kesenjangan capaian dan permasalahan pelaksanaan;
- Penyusunan dan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan (RTL) terhadap aspek pembelajaran, riset, PkM, maupun tata kelola laboratorium;
- Penyesuaian kegiatan dan mekanisme kerja agar tetap selaras dengan standar mutu dan kebutuhan pemangku kepentingan.

5. Peningkatan (P)

Tahap peningkatan diarahkan pada penguatan mutu dan keberlanjutan laboratorium melalui:

- Penyempurnaan modul dan SOP berdasarkan hasil evaluasi dan perkembangan kebijakan serta teknologi;
- Pengembangan inovasi tata kelola dan layanan publik digital;
- Perluasan dan penguatan jejaring kerja sama dengan pemerintah daerah, desa Smart Village, dan lembaga terkait, guna meningkatkan dampak akademik dan sosial laboratorium secara berkelanjutan.



Gambar 2. Siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan

K. PENUTUP

Modul Laboratorium Tata Kelola Pemerintahan & Digital Governance disusun sebagai instrumen strategis untuk memperkuat pelaksanaan tridarma perguruan tinggi yang terintegrasi dan berorientasi pada capaian pembelajaran lulusan Program Studi Sarjana Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang. Modul ini menegaskan peran laboratorium tidak hanya sebagai sarana pendukung pembelajaran, tetapi sebagai learning ecosystem yang mendorong pengembangan kompetensi mahasiswa dalam praktik tata kelola pemerintahan, inovasi pelayanan publik, serta transformasi digital sektor publik berbasis Smart Village dan nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK).

Melalui keterkaitan yang kuat antara modul, CPL, profil lulusan, kurikulum, serta mekanisme PPEPP pengelolaan laboratorium, modul ini diharapkan mampu menjamin keberlanjutan mutu akademik, relevansi luaran dengan kebutuhan pemangku kepentingan, dan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah. Dengan demikian, Modul Laboratorium Tata Kelola Pemerintahan & Digital Governance menjadi landasan operasional yang mendukung pencapaian keunggulan program studi, sekaligus memenuhi Syarat Perlu Unggul IAPS LAMSPAK 2.0 secara konsisten, terukur, dan berkelanjutan.

Modul Laboratorium Tata Kelola Pemerintahan & Digital Governance disusun sebagai bagian integral dari upaya penguatan mutu akademik dan keunggulan keilmuan Program Studi Sarjana Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang. Modul ini dirancang untuk memastikan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan laboratorium berfungsi sebagai learning ecosystem yang mendukung pembelajaran berbasis praktik, penelitian terapan, serta pengabdian kepada masyarakat dalam bidang tata kelola pemerintahan dan transformasi digital sektor publik.

Keberadaan modul ini menegaskan keterpaduan antara visi, misi, tujuan, dan strategi (VMTS) program studi dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL), profil lulusan, kurikulum, serta peta jalan pengembangan laboratorium. Melalui integrasi yang sistematis dengan mata kuliah, kegiatan laboratorium, dan mekanisme penilaian berbasis CPL, modul ini mendorong penguasaan kompetensi mahasiswa dalam analisis tata kelola pemerintahan, inovasi pelayanan publik digital, penerapan prinsip *good governance*, serta pengembangan Smart Village yang berkelanjutan dan berorientasi pada kepentingan publik.

Penerapan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) dalam pengelolaan Laboratorium Tata Kelola Pemerintahan & Digital Governance menjamin terlaksananya penjaminan mutu secara berkelanjutan. Mekanisme ini memastikan bahwa seluruh aktivitas laboratorium terdokumentasi dengan baik, terukur capaian kinerjanya, relevan dengan kebutuhan pengguna, serta memberikan dampak nyata bagi pengembangan kapasitas pemerintah daerah, desa, dan unit layanan publik mitra.

Dengan demikian, Modul Laboratorium Tata Kelola Pemerintahan & Digital Governance menjadi instrumen strategis dalam memperkuat keunggulan Program Studi Sarjana Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang berbasis Smart Village, Digital Governance, dan nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK).